



RENCANA AKSI (RENAKSI) TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**RENCANA AKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %				No.	Aktivitas / Kegiatan	Jadwal Kegiatan				Target (output / keluaran)	Penanggung Jawab	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4				
1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11
1.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan BPBD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi	50%	50%			1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√			2 Dokumen	Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.950.000
			100%				2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√				1 Dokumen	Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.936.000
					100%		3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			√		1 Dokumen	Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.936.000
			100%				4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	√				1 Dokumen	Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.936.000
						100%	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				√	1 Dokumen	Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.936.000
			25%	25%	25%	25%	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√	√	√	√	1 Laporan	Kasubag. Keuangan	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.750.000
			100%				7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√				4 Dokumen	Kasubag. Hukum Perencanaan dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.388.000
	Jumlah Laporan Keuangan yang dapat dipenuhi		25%	25%	25%	25%	8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	1 Tahun	Kasubag. Keuangan	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.776.147.459
			100%				9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√				1 Laporan	Kasubag. Keuangan	Administrasi keuangan perangkat daerah	11.342.000
			50%	50%			10.	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertiksaan	√	√			1 Dokumen	Kasubag. Keuangan	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.308.000
	Jumlah Administrasi Barang milik daerah yang disediakan		25%	25%	25%	25%	11.	Penelaahan Barang milik Daerah	√	√	√	√	2 Laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Barang milik Daerah pada perangkat Daerah	8.050.000
	Jumlah Pelayanan jasa administrasi yang dapat dipenuhi		25%	25%	25%	25%	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	1 Paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.053.000
			25%	25%	25%	25%	13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	1 Paket	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.500.000

			25%	25%	25%	25%	14	Penyediaan Bahan Baku dan Perundang undangan	√	√	√	√	6 Layanan Bahan Baku dan Perundang undangan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.500.000
			25%	25%	25%	25%	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	√	1 Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.504.000
		Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang tersedia			100%		16	Pengadaan Mebel				√	Penyediaan Meubeler Kursi Rapat	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10.392.000
			100%				17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√				4 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dapat diadap	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	64.666.000
		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	25%	25%	25%	25%	18	Penyediaan jasa surat menyurat	√	√	√	√	1 Laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5.790.000
			25%	25%	25%	25%	19	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	1 Laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	133.336.000
			25%	25%	25%	25%	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	1 Laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	187.754.000
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	25%	25%	25%	25%	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	√	√	√	√	1 Unit Mobil Jabatan yang dipelihara	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40.960.000
			25%	25%	25%	25%	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	√	√	√	√	1 Laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	191.190.000
			25%	25%	25%	25%	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√	√	1 Laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	19.420.000
			25%	25%	25%	25%	24	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	√	√	√	√	1 Laporan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	63.460.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan ke bencana	Jumlah layanan jasa informasi rawan bencana	50%	50%			25	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana)	√	√			Aplikasi informasi petaporan dan pengaduan di google playstore	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	90.200.000

			25%	25%	50%	26	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		√	√	√	Dokumen Kajian Risiko Bencana	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	350.690.000
Jumlah Penanganan wilayah manajemen bencana	100%					27	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	√				Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan yang telah tersedia	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	133.270.000
												Jumlah Pakan Dinas lapangan yang telah tersedia			
	50%	15%	15%	20%		28	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	Jumlah Pohon yang di tebang/pangkas yang berpotensi menimbulkan dampak bencana pohon tumbang	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	155.320.000
	100%					29	Pengujian Kapasitas Kawas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	√				Jumlah Kawasan yang di tingkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	47.800.000
	35%	15%	20%	30%		30	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	1 Laporan Personil Tim Reaksi Cepat yang telah	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62.682.000
Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	40%	20%	20%	20%		31	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	1 Laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	232.374.000
	40%	15%	15%	30%		32	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	1 Laporan data n penanganan korban bencana	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	42.278.000
	60%	10%	10%	20%		33	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	1 Laporan ketersediaan logistik dan peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15.419.000
				100%		34	Aktivasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana				√	1 Laporan Penerimaan aktivasi sistem komando	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.741.000

	Jumlah Bantuan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	40%	20%	20%	20%	36	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	√	√	√	√	Persentase pengumpulan data kebencanaan	Kabid. Kedarifatan dan Logistik	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	53.113.000
		25%	25%	25%	25%	36	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	√	√	√	√	1 Laporan	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	653.151.450
	TOTAL					36	Kegiatan								4.626.232.509

Berteng, 15 Februari 2023
 Kepala Pelaksana Badan,

Drs. Agus Setiawan, M.Si
 NIP. 197304061992011 002



RENCANA AKSI TAHUN 2023
KANTOR KECAMATAN BUKI

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan buki	Nilai Sakip Kecamatan Buki	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : B (60)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Kinerja	TW1 : 25% TW2 : 50% TW3 : 75% TW4 : 100%	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 80%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	TW1 : 1 TW2 : 1 TW3 : 1 TW4 : 1	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	TW1 : 20% TW2 : 20% TW3 : 20% TW4 : 20%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	TW1 : 1 TW2 : 1 TW3 : 1 TW4 : 1	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	TW1 : 100 TW2 : 100 TW3 : 100 TW4 : 100	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	TW1 : 20% TW2 : 20% TW3 : 20% TW4 : 20%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	TW1 : 3 TW2 : 3 TW3 : 3 TW4 : 3	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	TW1 : 3 TW2 : 3 TW3 : 3 TW4 : 3	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan Kecamatan Buki sesuai SAP	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	TW1 : 20% TW2 : 40% TW3 : 60% TW4 : 83%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	TW1 : 30 TW2 : 30 TW3 : 30 TW4 : 30	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	TW1 : 1 TW2 : 1 TW3 : 1 TW4 : 1	
						Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 80%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	TW1 : 7 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara (Unit)	TW1 : 2 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit)	TW1 : TW2 : 1 TW3 : TW4 :	
Meningkatnya Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buki	TW1 : TW2 : TW3 : TW4: 100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 80%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dikoordinasikan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 80%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 80%	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Laporan)	TW1 : TW2 : 1 TW3 : TW4 :	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepda Camat	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 80%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Buki	Indeks Desa Membangun Kecamatan Buki	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%		Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 80%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	TW1 : 40% TW2 : TW3 : TW4 : 40%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 : 1	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 75%	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100	
									Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100	
									Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100	
									Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 :	
Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 70%	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 85%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 12	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 85%	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 12	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Buki	Tingkat toleransi di Kecamatan	TW1 : TW2 : TW3 : 100% TW4 :	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 0%	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	TW1 : TW2 : TW3 : 85% TW4 :	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	TW1 : TW2 : TW3 : 300 TW4 :	
									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang)	TW1 : 50 TW2 : TW3 : TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Buki	Indeks Desa Membangun Kecamatan Buki	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 55%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 70%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 70%	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	

Baruia, 21 Februari 2025

CAMAT BUKI,

DEMPAK, S.Pd
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19690921 199203 1 010

RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja kegiatan	Target Triwulan	Penanggung jawab
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.039.000	Persentase ketersediaan BMD	Trw 1 = 25% Trw 2 = 25% Trw 3 = 25% Trw 4 = 25%	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.256.000	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Trw 1 = 25% Trw 2 = 25% Trw 3 = 25% Trw 4 = 25%	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.821.783	Persentase BMD dalam kondisi baik	Trw 1 = 25% Trw 2 = 25% Trw 3 = 25% Trw 4 = 25%	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
4	Meningkatnya desa yang terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya	Tingkat pemenuhan jalan desa	%	75%	Trw 1 = 5% Trw 2 = 20% Trw 3 = 30% Trw 4 = 25%	Program Penyelenggaraa n Jalan	61.638.797.228	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	72,31	Kabid. Bina Marga	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota	61.638.797.228	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	72,31	
								Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	85,00						
								Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	98,50						
5	Meningkatnya kuantitas	Cakupan	%	18	Trw 1 =	Program	10.823.184.710	Persentase luas	90,00	Kabid. SDA	Pengelolaan	8.363.142.310	Persentase	10	

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja kegiatan	Target Triwulan	Penanggung jawab
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	75,4		Program Pengembangan Sistem Air Limbah	576.880.000	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00	Kabid Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	576.880.000	Jumlah kegiatan Pengelolaan dan pengembangan air limbah yang dilaksanakan	18	
		Rasio Luasan wilayah yang tidak mengalami genangan	%	72,5		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.547.721.000	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,45	Kabid Cipta Karya	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.547.721.000	tersedianya sistem drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	76	
		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	%	80		Program Penataan Bangunan Gedung	18.656.943.356	Persentase kepatuhan IMB	85,00	Kabid Cipta Karya	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	18.656.943.356	Jumlah rekomendasi pemberian dan penerbitan persetujuan bangunan gedung	200 rekom	
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	506.690.000	Persentase tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	22,02	Kabid. Bina Marga	Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	183.000.000	Persentase pelaksanaan pelatihan	100	
								Persentase	10,00		Penyelenggaraa n Sistem Informasi Jaga	223.690.000	Persentase penyelenggaraa n Sistem	100	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja kegiatan	Target Triwulan	Penanggung jawab
											Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
											Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	295.000.000			

Bontoharu, Januari 2023
Kepala Dinas,

MUHAMMAD RAMLI, S.T.
NIP. 19671214 200312 1 007

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai AKIP Dinas Perindag KUKM	Angka	51,01	Trw 1 = 100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.953.306.497	Persentase Capaian Kinerja (%)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.895.500	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Trw 1 = 50	Sub Bagian Program
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat				Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 50	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0				Trw 4 = 0					Trw 4 = 0	
		Nilai perencanaan kinerja	Angka	18.25	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 13.520.00	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Nilai pengukuran kinerja	Angka	12.15	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.892.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Nilai pelaporan kinerja	Angka	11.15	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 5.880.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab	
														Trw 3 = 0		
														Trw 4 = 0		
											Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun (%)	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan	
														Trw 2 = 0		
														Trw 3 = 0		
														Trw 4 = 0		
											Sub Kegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. -	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun	Trw 1 = 0	Kasubag Keuangan	
														Trw 2 = 0		
														Trw 3 = 0		
														Trw 4 = 0		
											Sub Kegiatan 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. -	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset (BI, KIR, KIB, CIL)	Trw 1 = 0	Kasubag Keuangan	
														Trw 2 = 0		
														Trw 3 = 0		
														Trw 4 = 0		
											Sub Kegiatan 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 10.000.000	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 100	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum	
														Trw 2 = 0		
														Trw 3 = 0		
														Trw 4 = 0		

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 799.875.750	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran (%)	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 1. Pengadaan Mebel	Rp. 12.000.000	Jumlah Motor Dinas yang diadakan	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 231.086.500	Jumlah mebeleur yang disediakan	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 166.789.250	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Trw 1 = 100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 390.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 644.242.000	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran (%)	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.5.000.0000	Jumlah surat dinas yang terkirim	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.145.677.200	Jumlah Layanan Telpon, Listrik dan Air yang tersedia	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 31.340.000	Persentase peningkatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
											Sub Kegiatan 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 28.500.000	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang terpelihara	Trw 1 = 100	Kasubag Keuangan
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 15.675.000		Trw 1 = 100	
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	Angka	10.5	Trw 1 = 100	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 1.904.195.000	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Trw 1 = 100	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM	Penilaian Kesehatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. -	Jumlah Koperasi yang sehat organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	Trw 1 = 0	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
					Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0				Trw 4 = 0					Trw 4 = 0	
		Persentase koperasi aktif	Angka	82,42	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. -	Meningkatnya kesadaran berkoperasi	Trw 1 = 0	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Angka	100	Trw 1 = 100										
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Persentase BPR/LKM aktif	Angka	100	Trw 1 = 100	Program Pemberdayaan Perlindungan Komsumen	Rp. -	Persentase Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Trw 1 = 100	Kabid.Koperasi dan UKM	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang ke anggotannya dalam daerah kabupaten/Kota	Rp. -	Jumlah Koperasi Sehat	Trw 1 = 0	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM
					Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	Angka	100	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.-	Jumlah koperasi yang naik kelas	Trw 1 = 0	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
		Persentase produk lokal yang dipasarkan	Angka	100	Trw 1 = 100										
					Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0				Trw 4 = 0					Trw 4 = 0	
		Cakupan bina kelompok Pedagang/Usaha informal	Angka	100	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sitem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Rp. 1.720.161.000	Jumlah IKM yang diFasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin usaha Industri	Trw 1 = 100	Kepala Bidang Perindustrian
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
											Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Indutri Dalam Lingkup IUI,PIUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	Rp. 6.435.612,000	Kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/Jeneponto Pelatihan pembuatan gerabah	Trw 1 = 100	Kepala Bidang Perindustrian
														Trw 2 = 0	
														Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
		Cakupan bina kelompok pengrajin	Angka	102	Trw 1 = 100	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 77.500.000	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor (%)	Trw 1 = 100	Seksi Standarisasi dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Rp. 77.500.000	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan	Trw 1 = 100	Seksi Standarisasi dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
					Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

															Trw 4 = 0	

Benteng, 15 Desember 2022

Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar,



ANDI ABDURRAHMAN, SE,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005

RENCANA AKSI TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9										10	11	12	13		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		302.337.000																
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jenis Jasa Surat Menyurat	4 Jenis	- Menyiapkan ATK untuk kebutuhan surat-menyurat	23.068.000	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	4 Jenis	100%		
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	- Melakukan pembayaran pemakaian jasa layanan internet sesuai struk tagihan	89.750.000	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	1 Bln	12 Bln	100%		
						- Melakukan pembayaran pemakaian jasa layanan air sesuai struk tagihan																	
						- Melakukan pembayaran pemakaian jasa layanan listrik struk tagihan																	
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Menyiapkan Laporan dan daftar terkait pembayaran Gaji PHL dan BPJS ketenagakerjaan	189.519.000	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	12 Bulan	100%					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya usia pakai sarana dan prasarana penunjang pelayanan	100%		102.730.000																
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kedaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan Roda 2 (dua)	1 Unit	- Menginventarisasi kendaraan dinas jabatan roda 4 yang akan dipelihara	18.200.000	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	1 Unit	100%		
						- Membayar pajak kendaraan dinas jabatan roda 4																	
						- Menyediakan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4																	
						- Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4																	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan Roda 4 (empat)	10 Unit	- Menginventarisasi kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4 yang akan dipelihara	77.260.000	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	10 Unit	100%		
						- Membayar pajak kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4																	
						- Menyediakan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, operasional roda 2 dan 4																	
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 Unit	- Menginventarisasi peralatan dan mesin kantor yang akan dipelihara	7.270.000	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	25%	-	16 Unit	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9										10	11	12	13
			- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2 Laporan	- Pembentukan Tim Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						- Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait															
						- Penyusunan Buku Data Kependudukan Semester II Tahun 2022															
						- Pencetakan Buku Data Kependudukan Semester II Tahun 2022															
						- Penyusunan Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2023															
						- Pencetakan Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2023															
			- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	- Pemberian Hak Akses Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna	15 OPD	- Pembentukan Tim Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						- Rapat Tim Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukam															
						- Penyajian Bahan Pendukung terkait Perjanjian Kerjasama															
						- Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD															
						- Rapat hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama															
						- Pembuatan draft Perjanjian Kerjasama															
						- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD															
						- Monitoring dan evaluasi OPD yang telah mengakses data berdasarkan Perjanjian Kerjasama															
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi adminbistrasi kependudukan yang diselenggarakan	100%		55.630.000														
			- Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Penggunaan Aplikasi SIAK dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	- Koordinasi dan Konsultasi dengan bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terkait penggunaan aplikasi SIAK	38.000.000	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	24 Lap	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9										10	11	12	13
						- Koordinasi dan Konsultasi terkait Penyusunan Profil Data Kependudukan															
						- Rapat hasil koordinasi dan konsultasi Penyusunan Profil Data Kependudukan															
						- Perbaikan Profil Data Kependudukan yang telah dikonsultasikan															
						Penandatanganan Buku Profil data Kependudukan dan Proyeksi kependudukan															
JUMLAH							3.718.476.147														

Benteng, 25 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL.

Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196709805 198811 1 003

RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET				NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN				TARGET OUTPUT/ KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya nilai sakiD Dinas Sosial	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	1			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√			2 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	√				1 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan			1		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			√		1 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1				4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	√				1 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan			1		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD			√		1 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah dokumen yang dihasilkan				1	6	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√	√	√	√	1 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah dokumen yang dihasilkan	2	2		1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	5 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah dokumen yang dihasilkan	1				8	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	√				1 Dokumen	Kasubag Umum Kepegawaian dan
	Meningkatnya tertib	Jumlah dokumen yang dihasilkan				1	9	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	√	√	√	√	1 Dokumen	Kasubag. Program Dan Keuangan
		Jumlah ASN Dinas Sosial	22	22	22	22	10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	22 Orang	Kasubag. Program Dan
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan				1	11	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	√	√	√	√	1 Dokumen	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan				1	12	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	√	√	√	√	1 Dokumen	Kasubag Umum Kepegawaian dan
		Jumlah ASN Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		3			13	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		√			3 ASN	Kasubag Umum Kepegawaian dan
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi				1	14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	√	√	√	√	1 Tahun	Kasubag Umum Kepegawaian dan
		Tersedianya bahan logistik kantor	3	3	3	3	15	Penyediaan bahan logistik kantor	√	√	√	√	12 Bulan	Kasubag Umum Kepegawaian dan
		Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	3	3	3	3	16	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√	√	12 Bulan	Kasubag Umum Kepegawaian dan

administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan				1	17	penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	√	√	√	√	1 Tahun	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
	Tersedianya jasa surat penyurat	3	3	3	3	18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	12 Bulan	Kasubag Umum Kepegawaian dan
	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	3	3	3	19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	√	√	√	√	12 Bulan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	3	3	3	3	20	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	√	√	√	√	12 Bulan	Kasubag Umum Kepegawaian dan
	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi berat	1				21	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	√	√	√	√	1 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan
	Tersedianya jasa perizinan kendaraan Dinas (Operasional)		24			22	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	√	24 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
	Jumlah yang dipelihara	4		4		23	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√	√	√	√	8 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan
	Jumlah aset lainnya yang dipelihara		4		4	24	Pemeliharaan aset tetap lainnya	√	√	√	√	8 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan
	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kemampuannya	11	11	11	11	25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	√	√	√	√	11 Orang	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Jumlah PSKS Lembaga (Karang Taruna) yang meningkat kemampuannya		1	1		26	Peningkatan Kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	√	√	√	√	2 Karang Taruna	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Jumlah anak terlantar yang diberi bantuan permakanan			220		27	Penyediaan Permakanan	√	√	√	√	220 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah Anak terlantar, Lansia dan Penyandang Disabilitas yang diberi			90		28	Penyediaan Sandang	√	√	√	√	90 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang diberi bantuan				10	29	Penyediaan Alat Bantu	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah PPKS yang difasilitasi				10	30	Pemberian layanan reunifikasi keluarga	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah PPKS yang difasilitasi				10	31	Pemberian bimbingan fisik, Mentel, spiritual dan sosial	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar terhadap penerima layanan SPM	Jumlah Pendamping PKH yang memberi bimbingan/pendampingan		30			32	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelendangan pengemis dan Masyarakat	√	√	√	√	30 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Jumlah PPKS yang difasilitasi				10	33	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah PPKS yang difasilitasi				10	34	Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah PPKS yang difasilitasi				10	35	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah Anak berhadapan Hukum yang tertangani			40		36	Pemberiaan layanan kedaruratan	√	√	√	√	40 Anak	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah PPKS yang difasilitasi				10	37	Pemberian layanan penelusuran keluarga	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa yang tertangani			10		38	Pemberian Layanan rujukan	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Penerima BPNT/Sembako yang di pantau dan diawasi penyalurannya	10558 KPM	10558 KPM	10558 KPM	10558 KPM	39	Pemberiaan Layanan Data dan Pengaduan	√	√	√	√	10558 KPM	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan pemulihan dampak covid-19 dan Pelaksanaan Anjagsana		330			40	Penyediaan Permakanan	√	√	√	√	330 KK	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Jumlah PMKS yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kube		486			41	Penyediaan Alat Bantu	√	√	√	√	486 KK	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Jumlah pelayanan pada SLRT				251	42	Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	√	√	√	√	251 Orang	Kasubag. Program Dan Keuangan
	Jumlah keluarga/ahli waris pahlawan yang mendapatkan Penghargaan		9			43	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga		√	√		9 KK	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
	Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan Perbaikan Rumah		31			44	Pemberiaan Layanan Rujukan		√	√	√	31 KK	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

		Jumlah anak terlantar/disabilitas yang difasilitasi untuk mendapatkan pembinaan/pelatihan/kursus keterampilan		5	5	5	45	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kab/kota		√	√	√	15 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
		Jumlah anak terlantar yang terjangkau		30			46	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	√	√			30 Anak	Bidang Rehabilitasi Sosial
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan		20			47	Rujukan Anak-anak terlantar		√	√	√	20 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial
		terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin dengan Aplikasi Siks Ng dan SLRT serta Web Dinas Sosial		1	1	1	48	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	2 Aplikasi 1 Web	Kasubag. Program Dan Keuangan
	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan permakanan		40			49	Penyediaan Makanan	√	√	√	√	40 KK	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan Sandang		30			50	Penyediaan Sandang	√	√	√	√	30 KK	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Jumlah Korban Bencana/Orang terlantar yang ditampung		10			51	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	√	√	√	√	10 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Jumlah Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang mendapat tali asih	22	22	22	22	52	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	√	√	√	√	22 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Pemeliharaan TMP dan Pelaksanaan Hai Pahlawan		1			53	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	√	√	√	√	1 Unit	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Benteng, 11 Februari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19730217 199803 2 011

**RENCANA AKSI
DINAS KESEHATAN TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)			
			TARGET	SATUAN				TARGET	SATUAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	B (65)	Nilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan :								
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Rp88.783.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	Rp3.823.000	✓			
						2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	Rp5.000.000		✓		
						3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	Rp5.000.000		✓		
						4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	Rp5.000.000				✓
						5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	Rp5.000.000				✓
						6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	Rp59.960.000	✓			
						7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Lap	Rp5.000.000	✓	✓	✓	✓

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)			
			TARGET	SATUAN				TARGET	SATUAN		I	II	III	IV
						Kegiatan :								
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Rp43.098.048.738				
						Sub Kegiatan :								
						1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	810	Orang/Bulan	Rp43.073.796.738	✓	✓	✓	✓
						2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dok	Rp5.000.000	✓	✓	✓	✓
						3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	Rp4.252.000	✓			
						4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	Rp5.000.000	✓			
						5. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	Rp5.000.000	✓			
						6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Lap	Rp5.000.000	✓	✓	✓	✓
						Kegiatan :								
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Rp15.000.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	Rp15.000.000	✓	✓	✓	✓

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)			
			TARGET	SATUAN				TARGET	SATUAN		I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	180	100.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah yang Disediakan	100	%	Rp104.647.306.915				
		Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH	4,3	1.000 KH		Sub Kegiatan :								
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	3,5	%		1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2	Unit	Rp93.614.497.184	✓	✓	✓	✓
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,7	%		2. Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	Unit	Rp150.000.000	✓	✓	✓	✓
		Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (succes rate)	90	%		3. Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	Unit	Rp1.445.551.568	✓	✓	✓	✓
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	90	%		4. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	Rp9.017.258.163	✓	✓	✓	✓
		Persentase Pelayanan Hipertensi	100	%		5. Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	Paket	Rp420.000.000	✓	✓	✓	✓
		Persentase Rumah Tangga BerPHBS	69	%		Kegiatan :								
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	Rp85.749.743.737				
						Sub Kegiatan :								
						1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30	Orang	Rp5.000.000	✓	✓	✓	✓
						2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	Dok	Rp2.869.710.500	✓	✓	✓	✓
						3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dok	Rp105.000.000	✓	✓	✓	✓
						4. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dok	Rp635.850.000	✓	✓	✓	✓

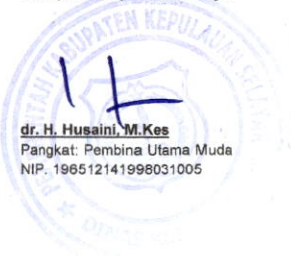
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)			
			TARGET	SATUAN				TARGET	SATUAN		I	II	III	IV
						5. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dok	Rp82.251.837	✓	✓	✓	✓
						6. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dok	Rp61.406.805.400	✓	✓	✓	✓
						7. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota	1	Dok	Rp5.000.000	✓	✓		
						8. Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	Dok	Rp18.660.462.000	✓	✓	✓	✓
						9. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dok	Rp1.979.664.000	✓	✓	✓	✓
						Kegiatan :								
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	Rp5.000.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	1	Dok	Rp5.000.000	✓	✓	✓	✓
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan :								
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	Rp15.000.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10	Orang	Rp15.000.000	✓	✓	✓	✓

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)			
			TARGET	SATUAN				TARGET	SATUAN		I	II	III	IV
						Kegiatan :								
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100	%	Rp10.000.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dok	Rp10.000.000	✓	✓	✓	✓
						Kegiatan :								
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	%	Rp116.705.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp7.160.000	✓	✓	✓	✓
						2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dok	Rp4.020.000	✓	✓	✓	✓
						3. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Lap	Rp5.525.000	✓	✓	✓	✓
						4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Lap	Rp100.000.000	✓	✓	✓	✓
						Kegiatan :								
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp14.109.534.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Lap	Rp650.556.000	✓	✓	✓	✓
						2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Lap	Rp13.458.978.000	✓	✓	✓	✓
						Kegiatan :								
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%	Rp875.442.234				
						Sub Kegiatan :								
						1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220	Unit	Rp873.982.234	✓	✓	✓	✓
						2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	Rp1.460.000			✓	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN	JADWAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)			
			TARGET	SATUAN				TARGET	SATUAN		I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	100	%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan :								
						Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	Rp200.000.000				
						Sub Kegiatan :								
						1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dok	Rp200.000.000	✓	✓	✓	✓

Parappa, 05 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar


dr. H. Husaini, M.Kes
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 196512141998031005

RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				AKSI/KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN				TARGET OUTPUT/KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100%				1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
2	Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	100%				1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100%		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD			100%		1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
4	Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%				Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	100%				1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
5	Tersusunnya Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100%	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD				100%	1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan



6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100%				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%				2 Laporan	Kasubag program dan Keuangan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25%	50%	75%	100%	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25%	50%	75%	100%	13 Laporan	Kasubag program dan Keuangan
8	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25%	50%	75%	100%	Penyediaan gaji dan tunjangan AsN	25%	50%	75%	100%	26 Orang	Kasubag program dan Keuangan
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	100%				1 Laporan	Kasubag program dan Keuangan
10	Tersedianya dokumen akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25%	50%	75%	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25%	50%	75%	100%	6 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
11	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25%	50%	75%	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum



12	Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25%	50%	75%	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	25%	50%	75%	100%	1 Orang	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
13	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25%	50%	75%	100%	1 Paket	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
14	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25%	50%	75%	100%	1 Paket	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
15	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	25%	50%	75%	100%	1 Paket	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
16	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25%	50%	75%	100%	89 Dokumen	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
17	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi (laporan hasil perjalanan dinas)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25%	50%	75%	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25%	50%	75%	100%	215 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
18	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25%	50%	75%	100%	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25%	50%	75%	100%	1 Dokumen	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum



20	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
21	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
22	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25%	50%	75%	100%	19 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
23	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25%	50%	75%	100%	32 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
24	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25%	50%	75%	100%	1 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
25	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	25%	50%	75%	100%	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik	25%	50%	75%	100%	3 Layanan	Kabid Perpustakaan



26	Terlaksananya Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25%	50%	75%	100%	Pengelolaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	25%	50%	75%	100%	200 Eksemplar	Kabid Perpustakaan
27	Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	40 Dokumen	Kabid Perpustakaan
28	Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25%	50%	75%	100%	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	25%	50%	75%	100%	1 Perpustakaan	Kabid Perpustakaan
29	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25%	50%	75%	100%	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25%	50%	75%	100%	250 Arsip	Kabid Kearsipan
30	Tersedianya Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25%	50%	75%	100%	1 Pengguna	Kabid Kearsipan



31	Tesedianya Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kabid Kearsipan
32	Tersedianya Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25%	50%	75%	100%	Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25%	50%	75%	100%	200 Arsip	Kabid Kearsipan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



H. SALAHUDDIN, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670604 199003 1 015













RENCANA AKSI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Nilai LAKIP	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B	63,00	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.176.874.382	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 36.305.000	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.497.000	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Trw 1 = Rp. 11.930.000 Trw 2 = Rp. 567.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 9.566.000	Jumlah dokumen RKA SKPD	Trw 1 = Rp. 9.566.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.466.000	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD	Trw 1 = Rp. 3.600.000 Trw 2 = Rp. 2.366.000 Trw 3 = Rp. 500.000 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.776.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Trw 1 = Rp. 7.776.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
										Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.424.701.182	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.344.484.582	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Trw 1 = Rp. 2.344.484.582 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
															Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 69.143.000	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Trw 1 = Rp. 65.465.000 Trw 2 = Rp. 3.678.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.120.000	Jumlah dokumen/laporan keuangan tepat waktu	Trw 1 = Rp. 4.120.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
															Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 3.500.000	Jumlah dokumen hasil tanggapan pemeriksaan	Trw 1 = Rp. 1.133.000 Trw 2 = Rp. 2.367.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Program dan Keuangan
															Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 3.453.600	Jumlah laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Trw 1 = Rp. 1.455.000 Trw 2 = Rp. 1.135.600 Trw 3 = Rp. 463.000 Trw 4 = Rp. 400.000	Kasubbag. Program dan Keuangan
										Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 9.433.000	Persentase ketersediaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1.385.000	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Trw 1 = Rp. 1.385.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 4.851.000	Jumlah laporan barang milik daerah yang sudah direkonsiliasi	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 4.851.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 3.197.000	Jumlah laporan pembukuan barang milik daerah pada SKPD	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 3.197.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
										Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 11.664.000	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 6.332.000	Jumlah data administrasi kepegawaian	Trw 1 = Rp. 6.332.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 5.332.000	Jumlah data pegawai yang terintegrasi dengan sistem informasi	Trw 1 = Rp. 5.332.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
										Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 298.448.500	Persentase pemenuhan administrasi umum	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.015.000	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Trw 1 = Rp. 3.015.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 22.860.000	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Trw 1 = Rp. 22.860.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 14.887.500	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Trw 1 = Rp. 10.000.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 4.887.500 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.000.000	Jumlah dokumen/jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 3.000.000 Trw 3 = Rp. 3.000.000 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Penyediaan Bahan/ Material	Rp 51.686.000	Jumlah ATK yang tersedia	Trw 1 = Rp. 29.735.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 21.951.000 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 200.000.000	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Trw 1 = Rp. 100.000.000 Trw 2 = Rp. 50.000.000 Trw 3 = Rp. 50.000.000 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
										Sekretaris Dinas Kawasan Permukiman	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 40.807.000	Persentase pemenuhan barang milik daerah	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 40.807.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	Trw 1 = Rp. 40.807.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
										Sekretaris Dinas Kawasan Permukiman	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 128.125.700	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6.500.000	Jumlah dokumen penyediaan jasa surat menyurat	Trw 1 = Rp. 6.500.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 121.625.700	Jumlah biaya tagihan telpon, air, listrik dan wifi	Trw 1 = Rp. 121.625.700 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
										Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 227.390.000	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 110.940.000	Jumlah Kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dipelihara	Trw 1 = Rp. 110.940.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 16.450.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 16.450.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
															Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 100.000.000	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Trw 1 = Rp. 100.000.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
2	Meningkatnya Kualitas Akses dan Mutu dalam Hal Urusan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	Trw 1 =	Program Pengembangan Perumahan	747.590.600	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Kabid. Perumahan	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 60.000.000	Jumlah data Rumah korban bencana atau relokasi pemerintah yang akan direhabilitasi	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp 20.000.000	Dokumen/ Laporan rumah korban bencana	Trw 1 = Rp. 20.000.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =										Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 20.000.000	Dokumen/laporan kerusakan rumah akibat bencana	Trw 1 = Rp. 9.600.000 Trw 2 = Rp. 10.400.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000	Surat Keputusan Penerima bantuan	Trw 1 = Rp. 9.600.000 Trw 2 = Rp. 10.400.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
										Kabid. Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 27.590.600	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi terkait penyediaan rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Rp 5.995.200	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	Trw 1 = Rp. 5.995.200 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Rembuh Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Rp 6.545.200	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Trw 1 = Rp. 3.600.000 Trw 2 = Rp. 2.945.200 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp 15.050.200	Jumlah dokumen/ laporan hasil koordinasi	Trw 1 = Rp. 8.812.200 Trw 2 = Rp. 3.354.000 Trw 3 = Rp. 2.884.000 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										Kabid. Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rp 660.000.000	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun dan diperbaiki	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 460.000.000	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi	Trw 1 = Rp. 2.250.000 Trw 2 = Rp. 229.020.000 Trw 3 = Rp. 228.730.000 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 200.000.000	Jumlah rumah bagi korban bencana yang terbangun	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 100.000.000 Trw 3 = Rp. 100.000.000 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
3	Menurunnya Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	%	3,16	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Program Kawasan Permukiman	506.742.000	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditata dan ditingkatkan Kualitasnya	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Kabid. Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp 220.699.000	Tersedianya izin pembangunan dan pengembangan permukiman	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 175.000.000	Tersedianya Perda/ Perbup terkait Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kumuh	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 175.000.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Rp 45.699.000	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Trw 1 = Rp. 31.394.000 Trw 2 = Rp. 14.305.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
											Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 81.478.000	Luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp 17.050.000	Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di permukiman kumuh	Trw 1 = Rp. 915.000 Trw 2 = Rp. 16.135.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rp 13.450.000	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh	Trw 1 = Rp. 3.310.000 Trw 2 = Rp. 10.140.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 28.262.000	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Trw 1 = Rp. 15.604.000 Trw 2 = Rp. 12.658.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 22.716.000	Tersedianya Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	Trw 1 = Rp. 7.218.000 Trw 2 = Rp. 12.950.000 Trw 3 = Rp. 2.548.000 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Rp 204.565.000	Menurunnya persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Penyusunan Rencana Tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	Rp 100.000.000	Site Plan	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. 100.000.000 Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 40.000.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. 40.000.000 Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 26.979.000	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Trw 1 = Rp. 2.011.000 Trw 2 = Rp. 24.968.000 Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Pendataan dan Verifikasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 37.586.000	Jumlah data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Trw 1 = Rp. 5.191.000 Trw 2 = Rp. 32.395.000 Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
4	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rasio rumah layak huni	%	5,91	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	40.000.000	Capaian pembiaian penanganan kawasan permukiman kumuh	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Kabid. Perumahan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000	Persentase penurunan kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp 40.000.000	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. 20.000.000 Trw 3 = Rp. 20.000.000 Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
5	Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	1,41	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.695.202.900	Persentase PSU yang terpelihara dan terbangun	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 =	Kabid. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumaha	Rp 3.695.202.900	Persentase urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 189.200.400	Tersedianya dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	Trw 1 = Rp. 182.334.400 Trw 2 = Rp. 6.866.000 Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 3.460.802.500	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	Trw 1 = Rp. 1.494.556.200 Trw 2 = Rp. 496.230.000 Trw 3 = Rp. 1.470.016.300 Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda
															Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp 45.200.000	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Trw 1 = Rp. 45.200.000 Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	0 Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung jawab	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6			%	100		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.800.000	Jumlah usaha jasa/pelaksana perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan kecil yang tersertifikasi	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Kabid. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Rp 20.800.000	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	Trw 1 = Rp. Trw 2 = Rp. Trw 3 = Rp. Trw 4 = Rp.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Rp 20.800.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah	Trw 1 = Rp. 19.930.000 Trw 2 = Rp. 870.000 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahl Muda
															TOTAL	8.187.209.882		8.187.209.882	

KEPALA DINAS

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19840104 200903 2 003

DOKUMEN

RENCANA AKSI

TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (Performance) satuan kerja DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar mutlak diperlukan guna membangun persepsi dan komitmen di lingkungan DPMPTSPTK dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Aksi yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026.

Rencana Aksi sangat penting bagi upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada Dasarnya adalah indikator sasaran (outcome) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Melalui rencana aksi diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Benteng, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19750101 199903 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RENCANA AKSI 2023.....	7
BAB V PENUTUP	26

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelaksana otonomi daerah di bidang Penanaman Modal dan perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh satuan kerja dibawahnya, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
- g. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan dan pelaporan layanan;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- j. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum dalam lingkup Dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- m. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- n. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- o. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- q. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- r. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- s. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- t. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- u. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- v. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan;
- w. menyusun dokumen evaluasi Dinas;
- x. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas;
- y. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- z. memfasilitasi penjaringan inovasi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
- bb. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- cc. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- dd. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- ee. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- ff. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- gg. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
- hh. menyusun laporan keuangan akhir tahun;

- ii. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- jj. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kk. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ll. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal melaksanakan Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- c. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- d. mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- e. melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- f. merencanakan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- g. menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- h. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- i. melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- j. melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- k. membangun dan mengembangkan serta mengelola sistem informasi penanaman modal;
- l. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- m. menyusun laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

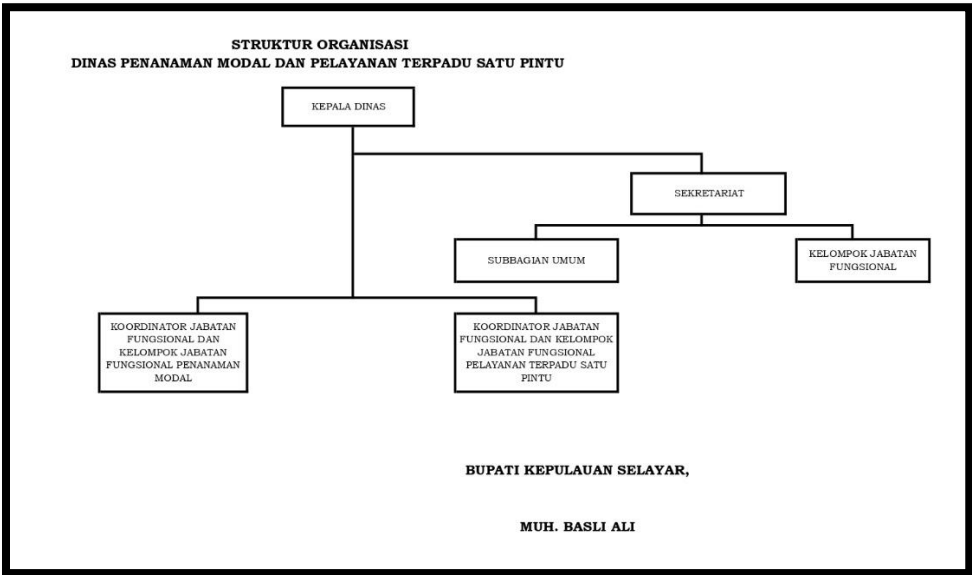
- a. menyusun rencana kegiatan Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. melaksanakan pemberian informasi, publikasi, konsultasi pengaduan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaksanakan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;

- h. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- i. melaporkan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan menyelenggarakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kepulauan Selayar
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2022)



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

B. Sumber Daya Manusia

1. Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar menurut kepangkatan tahun 2022 sebagai berikut :

- JPTP = 0 orang
- Administrator (Kelas 12) = 1 orang
- Administrator (Kelas 11) = 4 orang
- Pengawas = 16 orang
- Pelaksana = 23 orang
- Fungsional = 2 orang
- Jumlah = 46 orang**

Untuk mengetahui sumberdaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, PTSP
Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon
Per Desember 2022

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai Kontrak	Pegawai Sukarela
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	4	-	6	1	2	1	2	6	-	-
2	Strata Satu (S1)	4	21	-	25	-	3	13	9	25	23	-
3	Diploma	-	3	1	4	-	-	2	2	4	0	-
4	SLTA	1	2	8	11	-	-	0	11	11	23	-
Jumlah		7	30	9	46	1	5	16	24	46	46	-

Sumber data : Subag. Umum, Kepeg. dan Keuangan Dinas PMPTSPTK Kab. Kepulauan Selayar
Tahun Desember 2022

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana

dalam tabel 1.1 tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah presentatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya Sebagian belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana tertera pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 1.2
 Data Asset dan Kondisinya
 Dinas PMPTSPTK Kab. Kepulauan Selayar
 Per Desember 2022

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
1	Lemari Besi	18	-	18	2006,2009, 2011, 2012, 2015, 2017,2018
2	Lemari Kaca	13	-	13	2009,2015,2018
3	Lemari Piring	1	-	1	2009
4	Filling Cabinet	6	-	6	2006, 2009, 2018
5	Meja Kerja	78	3	81	2006,2014,2015, 2017,2018
6	Kursi Putar	13	-	13	2012, 2018, 2019
7	Kursi Tunggu	3	-	3	2009, 2019
8	Infocus	1	1	2	2013
9	Handycam	1	1	2	2012
10	Kursi tamu	3 set	-	3	2006, 2018
11	Komputer PC	69		69	2008,2013,2018
12	Laptop & Notebook	21	4	25	2011, 2014, 2018
	Hardisk	2		2	2011
13	Camera Digital	1	1	2	2012
14	Mesin Ketik	1	1	2	2009, 2015
15	Wireles	2	-	2	2009, 2015
16	Printer	25	5	30	2009, 2016, 2018
17	Pendingin Ac	10	1	11	2009, 2015, 2018
18	TV	6	-	6	2009, 2015, 2017,2018
19	Kursi Futura	144	-	144	2009,2012,2017, 2018, 2019
20	Faximili	1	-	1	2006
21	Sepeda Motor	17	-	17	2012, 2013, 2017, 2018, 2019
22	Mobil Innova	1	-	1	2009

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
23	Dispencer	4	-	4	2012,2016,2017
24	Running Teks	2	-	2	2016
25	Tangga Aluminium	4	-	4	2016
26	Scanner	2	-	2	2017, 2018
27	TV 29 Inc	1	-	1	2017
28	Meja ½ Biro	32	-	32	2017, 2018
29	Meja Biro	52	-	52	2017,208,2019
30	Kursi Kerja	29	-	29	2017,2018,2019
31	Kipas Angin	4	-	4	2017, 2018, 2019
32	Jaringan Aplikasi	1	-	1	2017
33	Mesin Bor	7	-	7	2018
34	Mobil Pick Up	1		1	2008
35	Mobil Toyota Rush	1		1	2014
36	Kendaraan Bermotor Khusus IZusu	1		1	2019
37	Mesin gerinda	5		5	2016
28	Mesin Las Listrik	5		5	2016
29	Perkakas Pertukangan	486		486	2018
30	GPS	1		1	2014
31	Mesin Ketik	2		2	2009, 2015
32	Lemari Kaca	2		2	2014,2015
33	Papan Visual	7		7	2013,2014,2015
34	Papan pengumuman	1		1	2014
35	Mesin Absensi	1		1	2018
36	ATK	2		2	2013
37	AC	19		19	2019
38	Power suplay	1		1	2010
39	UPS	3		3	2013
40	Modem	3		3	2013
41	Proyektor	2		2	2010,2014
42	Handycam				
43	Layar proyektor	1			2008
44	Kompas geologi	1		1	2008
45	Peralatan pemetaan ukur	2		2	2014
46	Sound System	7		7	2018
47	Pesawat telepon	1		1	2011
48	Handy Talky	1		1	2008
49	Antena penerima VHF	1		1	2008
50	CCTV	1		1	2019

Sumber data : Kasubag Umum, Kpeg. Dan Keuangan. Dinas PMTSPTKKab. Kepulauan Selayar
Desember 2022

Berdasarkan jumlah perlengkapan yang tersedia sebagaimana gambaran dalam tabel tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah dan kualitas perlengkapan pada Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar belum representatif sebagaimana persyaratan yang dianjurkan permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang harus mempergunakan perangkat system komputerisasi yang berbasis LAN dan system pelayanan terkoneksi dengan Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Sistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal untuk penunjang pelayanan perizinan investasi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Surat Edara Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar;

15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik "SPIPISE";
27. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
29. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar;

30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, yaitu:

- 1) Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
- 2) Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2022.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 berikut ini:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50 %	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang =
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010
3	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	38.500	LKPM
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	1,50	LKPM
4	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	100 %	Jumlah Permintaan data/ Jumlah Pemenuhan data X 100% =

B. Rencana Aksi Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	-	-	-	Sesuai

Rencana Aksi 1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	1. Persentase Capaian Kinerja (%) 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	25%	25%	25%	25%		
	Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	25.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang ditetapkan	4 Dokumen				3.000.000,-	Dokumen Renja 2024, Laporan Forum OPD, dan Dokumen Renja Perubahan 2023
	Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, Menyusun draf Perjanjian Kinerja 2023, Casecadding 2023, Rencana Aksi 2023, SOP 2023, dan Renja 2024		✓	-	-	-		
	2. Melaksanakan Forum OPD		✓	-	-	-		
	3. Finalisasi Perjanjian Kinerja 2023, Casecadding 2023, Rencana Aksi 2023, SOP 2023, dan Renja 2024		✓	-	-	-		
	4. Mengimput Renja 2024 pada aplikasi		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	5.000.000,-	Dokumen RKA SKPD
	Rencana Aksi :		✓	-	-	-		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	1. Membuat Pra RKA, menginput RKA di Aplikasi, Asistensi RKA, Reviu RKA							
	2. Finalisasi RKA		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	5.000.000,-	Dokumen RKA Perubahan SKPD
	Rencana Aksi : 1. Membuat Pra RKA Perubahan, menginput RKA Perubahan di Aplikasi, Asistensi RKA Perubahan, Reviu RKA Perubahan		-	✓	-	-		
	2. Finalisasi RKA Perubahan		-	-	✓	-		
	Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	3.000.000,-	Dokumen DPA SKPD
	Rencana Aksi : Membuat Pra DPA, menginput DPA di Aplikasi, Asistensi DPA , Reviu DPA		✓	-	-	-		
	Finalisasi DPA Perubahan		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	-	3.000.000,-	Dokumen DPA Perubahan SKPD
	Rencana Aksi : Membuat Pra DPA Perubahan, menginput DPA Perubahan di Aplikasi, Asistensi DPA Perubahan, Reviu DPA Perubahan		-	✓	-	-		
	Finalisasi DPA Perubahan		-	-	✓	-		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Sub Kegiatan 6 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	7 Dokumen	-	-	-	4.000.000,-	Dokumen Capaian Kinerja
	Rencana Aksi : 1. Pengumpulan data, penyusunan draf LAKIP 2022, LKPJ 2022, LPPD 2022, dan Laporan Evaluasi Internal 2023 per triwulan		✓	✓	✓	✓		
	2. Asistensi LAKIP 2022, LKPJ 2022, dan LPPD 2022		✓	-	-	-		
	3. Finalisasi LAKIP 2022, LKPJ 2022, LPPD 2022, dan Laporan Evaluasi Internal 2023 per triwulan		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 7 Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	-	-	4.000.000,-	Dokumen SAKIP
	Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan Data Evaluasi Kinerja 2022		✓	-	-	-		
	2. Menyetor Dokumen Evaluasi Kinerja 2022 kepada Inspektorat Daerah		✓	-	-	-		
	3. Melakukan Revisi Dokumen Evaluasi kinerja 2022 atas Review Inspektorat Daerah		✓	-	-	-		
	4. Menginput Dokumen Evaluasi Kinerja 2022 pada Aplikasi		✓	-	-	-		
	Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia						

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Sub Kegiatan 1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	49 Orang	49 Orang	49 Orang	3.805.752.022,-	
	Rencana Aksi: 1. Mengambil ampra gaji pada Bidang Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		✓	✓	✓	✓		
	2. Membuat SPM dan SPP kekurangan Gaji		✓	✓	✓	✓		
	3. Membuat daftar potongan gaji		✓	✓	✓	✓		
	4. Membuat SPM dan SPP Gaji		✓	✓	✓	✓		
	5. Membuat Konsep kenaikan gaji berkala (KGB) ASN		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen				5.000.000,-	
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan		✓	-	-	-		
	2. Asistensi LK dan Finalisasi LK		✓	-	-	-		
	Sub Kegiatan 3 penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan		1 Dokumen		1 Dokumen	5.000.000,-	
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan Keuangan Semesteran		-	✓	-	-		
	2. Asistensi LK dan Finalisasi LK Semesteran		-	✓	-	-		
	Sub Kegiatan 4	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,-	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran							
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data, penyusunan draf Laporan RFK		✓	✓	✓	✓		
	2. Asistensi RFK dan Finalisasi RFK		✓	✓	✓	✓		

Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Penanaman Modal	-	-	-	72,50 %

Rencana Aksi 2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	1. Persentase Capaian Kinerja (%) 2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	25%	25%	25%	25%		
	Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	2 Dokumen	1 Dokumen	-	25.000.000,-	
	Sub Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
	Rencana Aksi: 1. Pengumpulan data							
	2. Pengimputan data pada aplikasi							
	3. Melakukan Asistensi							

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	4. Finalisasi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Sub Kegiatan 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,-	Dokumen Rekonsiliasi Aset
	Rencana Aksi : 1. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Barang		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Penyusunan Rekonsiliasi Persediaan Barang		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,-	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Rencana Aksi : 1. Mengumpulkan bahan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Penyusunan KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		
	3. Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	4. Memfinalisasi dokumen KIB, KIR dan Aset Tetap		✓	✓	✓	✓		

Sasaran ke 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)				38.500
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)				1,50

Rencana aksi 3

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		
	Kegiatan 1. Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Penerimaan Misi Penanaman Modal	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	340.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	340.000.000	Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota
	1. Menyusun KAK Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi		✓					

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	2. Menyusun SK TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi		✓					
	3. Menyiapkan Rapat TIM Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓			
	4. Pengumpulan Bahan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
	5. Penyusunan Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
	3. Melaksanakan Asistensi			✓	✓	✓		
	4. Finalisasi Dokumen Fisibility Studi (FS) atau Kajian Kelayakan Investasi			✓	✓	✓		
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase potensi untuk peluang Investasi Daerah (%)	50%	50%	50%	50%	50.000.000	
	Kegiatan 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	5 Perusahaan				50.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
								dan Kemudahan Penanaman Modal
	Rencana Aksi : 1. Pengumpulan bahan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
	2. Penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
	3. Melakukan Asistensi		✓	✓	✓	✓		
	4. Finalisasi Perda Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal		✓	✓	✓	✓		
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	59.000				469.500.000	
	Kegiatan 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta Rupiah)	59.000				469.500.000	
	Sub Kegiatan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	182 Orang				348.090.000	Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Rencana aksi :							
	1. Membuat SK Tim Terpadu , KAK Terkait Kegiatan		✓	✓				

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal							
	2. Membuat SK Internal Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓				
	3. Melakukan rapat untuk Menentukan lokasi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan		✓	✓	✓	✓		
	4. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait sehubungan dengan akan dilaksanakannya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓	✓	✓		
	5. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha		✓	✓	✓	✓		
	6. Mengidentifikasi Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	dalam merealisasikan kegiatan usahanya							
	7. Menyelesaikan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Usaha/Kegiatan				121.410.000	Berapa Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
	Rencana Aksi 1. Membuat SK, KAK Terkait Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		✓	✓				
	2. Melaksanakan Analisa dan Verifikasi data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		✓	✓				
	3. Melaksanakan Inspeksi Lapangan		✓	✓	✓	✓		
	4. Melaksanakan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha		✓	✓	✓	✓		

Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan				100%

Rencana Aksi 4

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang di terbitkan (%)	100%	100%	100%	100%	72.000.000	
	Kegiatan 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Perizinan dan Non Perizinan	1300 izin				72.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.500.000	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Rencana aksi : 1. Menerima masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi dan pengaduan		✓	✓	✓	✓		
	2. Mendaftarkan identitas masyarakat		✓	✓	✓	✓		
	3. Menyelesaikan permasalahan sesuai tingkat aduan dan konsultasinya		✓	✓	✓	✓		
	4. Membuat Laporan hasil konsultasi dan aduan		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.530.000	Dokumen Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
	Rencana Aksi : 1. Penyusunan rencana pemantauan Usaha Beresiko Tinggi dan Menengah Tinggi		✓	✓	✓	✓		
	2. Menyusun Personil yang akan melakukan pemantauan		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	3. Pelaksanaan Pemantauan		✓	✓	✓	✓		
	4. Laporan Hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 3 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	325 izin	325 izin	325 izin	325 izin	32.000.000	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan izin
	Rencana Aksi : 1. Menerbitkan Registrasi Pemohon Izin		✓	✓	✓	✓		
	2. Melakukan Proses Berkas		✓	✓	✓	✓		
	3. Menerbitkan Izin		✓	✓	✓	✓		
	Sub Kegiatan 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 kali				12.970.000	
	Rencana Aksi: 1. Menerima permohonan fasilitas / Insentif Daerah dari Pengusaha		✓	✓	✓	✓		
	2. Mengkoordinasikan permohonan kepada tim		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	penilai pemberian fasilitas dan Insentif Daerah							
	3. Menyampaikan ke pemohon terkait hasil penilaian kelayakan pemberian fasilitas / pemberian insentif		✓	✓	✓	✓		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	100%	100%	100%	100%	8.000.000	
	Kegiatan 1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	100%	100%	100%	100%	8.000.000	
	Sub Kegiatan 1 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kab/kota	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8.000.000	Laporan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan sistem informasi
	Rencana Aksi : 1. Menerima dan mencatat permintaan Data sektor baik secara rutin perbulan ke OPD maupun permintaan informasi izin bagi yang membutuhkan		✓	✓	✓	✓		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target				Anggaran (Rp)	Output
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	2. Memberikan data penerbitan izin setiap bulannya kepada instansi teknis		✓	✓	✓	✓		
	3. Menginformasikan data terkait perizinan melalui website resmi		✓	✓	✓	✓		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	72,50 %
2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	-	-	-	Sesuai
3	Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	-	-	-	38.500
		Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	-	-	-	1,50
4	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	-	-	-	100 %

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2023, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Benteng, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19750101 199903 1 010

**RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN (TRIWULAN)				PENANGGUNG JAWAB
											I	II	III	IV	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	1. Indeks kepuasan layanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA yang tersusun Jumlah Dokumen RENSTRA yang tersusun Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	3 Dokumen	12.372.000	√	√			KASUBAG PROGRAM
			2. Nilai SAKIP OPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1 Dokumen	2.458.000			√	√	KASUBAG PROGRAM
			1.2 Meningkatnya Nilai SAKIP				1. Perencanaan Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	1 Dokumen	1.542.000			√	√
		2. Pengukuran Kinerja					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1 Dokumen	2.134.100			√	√	KASUBAG PROGRAM
		3. Pelaporan Kinerja					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	1 Dokumen	2.814.000			√	√	KASUBAG PROGRAM
		4. Evaluasi Internal					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP yang tersusun	1 Dokumen	3.353.000	√	√	√	√	KASUBAG PROGRAM
		5. Capaian Kinerja			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan PNS dan TPP	43 Orang	3.530.883.925	√	√	√	√	KASUBAG KEUANGAN
		1.3 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset	1. Laporan keuangan OPD sesuai SAP				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentasi Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang terselenggara	100%	47.099.000	√	√	√	√	KASUBAG KEUANGAN
2	Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan keahlian aparatur	1.1 Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1. Jumlah yang telah mengikuti pengembangan SDM melalui peningkatan pendidikan lanjutan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Terlaksananya Pelaporan Keuangan/Akuntansi SKPD	12 Laporan	11.008.000	√	√	√	√	KASUBAG KEUANGAN	

		1.2 Rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti Uji Kompetensi			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	2.765.000	√			√	KASUBAG KEUANGAN
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RFK bulanan yang tersusun	12 Laporan	11.100.000	√	√	√	√	KASUBAG KEUANGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	1 Laporan	11.109.000	√			√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUK PNSD Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersusun	1 Dokumen	13.736.000			√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Data Kinerja ASN yang dikelola	3766 Data	2.201.900	√	√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	100 Unit	7.846.000		√			KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	17.119.700	√	√	√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Media Cetak	13.870.000	√	√	√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material yang tersedia	12 Bulan	9.527.000		√			KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas	12 Bulan	189.339.000	√	√	√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip dan Tata Naskah Kepegawaian yang tersedia	1 Dokumen	12.990.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Absensi Online ASN yang terselenggara	3766 Orang	39.673.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor	28 Unit	15.140.500		√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	26.936.000	√	√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	82.776.000	√	√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	26 Unit	50.560.000	√	√	√	KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Perkantoran dalam konsisi baik yang terpelihara	1 Bangunan	49.951.000		√		KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Pengadaan ASN yang tersusun	225 formasi	47.870.300		√		KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
							Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengurusan dan Penerbitan KARIS/KARSU bagi PNS	200 kartu	35.060.000	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
								Jumlah Pengurusan dan Penerbitan Kartu Pegawai bagi PNS	200 kartu		√	√	√	
								Jumlah Pengurusan dan Penerbitan Kartu Peserta Taspen (KPT)	150 kartu		√	√	√	

							Jumlah Pengurusan dan Penerbitan SK PNS	150 SK					√				
							Jumlah Pengurusan dan Penerbitan SK CPNS	150 SK					√				
							Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	- Jumlah ASN yang terpenuhi	5200 Orang	22.503.000				√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN		
								- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN yang tersusun	1 Laporan					√			
							Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun	120 Orang	13.246.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN		
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	HUT KORPRI yang terselenggara	1 Kali	19.965.000				√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN		
							Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Data Pegawai dalam Aplikasi Simpeg yang terpelihara	100%	49.742.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN		
							Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	12.153.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN		
							Mutasi dan Promosi ASN	100%	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi, rotasi dan promosi	300 Orang	43.279.400	√	√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
							Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terselenggaranya ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	550 Orang	140.325.200		√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN		

							Pengelolaan Promosi ASN	- Jumlah Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terselenggara	1 kali	239.301.200	√	√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
								'- Jumlah Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah ASN yang terselenggara	1 kali		√	√	√	√	
					Pengembangan Kompetensi ASN	100%	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan KGB	600 SK	9.388.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- Jumlah SK Tugas Belajar, Surat Izin Belajar dan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan yang diterbitkan '- Jumlah ASN yang menerima bantuan Tugas belajar dan Penyelesaian Pendidikan	10 Orang	271.196.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANSUIA APARATUR
							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terselenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop ASN	2 Kali	95.500.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANSUIA APARATUR
							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	-Jumlah ASN ayng mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis/Fungsional dan Bimtek Khusus ASN	30 Orang	10.000.000	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANSUIA APARATUR
								-Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	10 Orang		√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANSUIA APARATUR

					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	<p>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <p>Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur</p> <p>Pembinaan Disiplin ASN</p> <p>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</p>	<p>Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang tersusun</p> <p>Jumlah ASN Berprestasi yang diberi Penghargaan</p> <p>Jumlah ASN yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya</p> <p>Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan</p> <p>Jumlah pelanggaran disiplin yang dikelola/ditindaklanjuti</p>	<p>3766 Orang</p> <p>8 Orang</p> <p>50 Orang</p> <p>35 Orang</p> <p>35 Orang</p>	<p>8.006.100</p> <p>34.316.000</p> <p>18.402.000</p> <p>12.734.600</p> <p>12.576.000</p>				√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
											√	√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
											√			√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
										√	√	√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
										√	√	√	√	√	KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	<p>Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<p>Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Bimtek Khusus</p>	<p>105 Orang</p>	<p>436.752.000</p>		√			KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator (PKA)	12 Orang	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANSUIA APARATUR
								365.883.000					
							- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasinal (PKN)	3 Orang	√	√	√	√	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANSUIA APARATUR
TOTAL ANGGARAN												6.068.502.925	

Benteng, 06 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



PATTA AMIR, S.JP
NIP. 19641127 198711 1 003

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai AKIP Dinas Perindag KUKM	Angka	51,01	Trw 1 = 100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.953.306.497	Persentase Capaian Kinerja (%)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.895.500	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Trw 1 = 50	Sub Bagian Program
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat				Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 50	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0				Trw 4 = 0					Trw 4 = 0	
		Nilai perencanaan kinerja	Angka	18,25	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 13.520.00	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Nilai pengukuran kinerja	Angka	12,15	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.892.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Nilai pelaporan kinerja	Angka	11,15	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 5.880.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P)	Trw 1 = 100	Sub Bagian Program

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
					Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0				Trw 4 = 0					Trw 4 = 0	
		Persentase koperasi aktif	Angka	82,42	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. -	Meningkatnya kesadaran berkeoperasi	Trw 1 = 0	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Persentase UKM non BPRLKM aktif	Angka	100	Trw 1 = 100										
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Persentase BPRLKM aktif	Angka	100	Trw 1 = 100	Program Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	Rp. -	Persentase peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Trw 1 = 100	Kabid.Koperasi dan UKM	Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang ke anggotaaanya dalam daerah kabupaten/Kota	Rp. -	Jumlah Koperasi Sehat	Trw 1 = 0	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM
					Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
														Trw 4 = 0	
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	Angka	100	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelengkapan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.-	Jumlah koperasi yang naik kelas	Trw 1 = 0	Kepala Bidang Koperasi Dan UKM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
														Trw 3 = 0	
									Trw 4 = 0						
									Trw 1 = 100		Sub Kegiatan 3. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp. 50.200.000	Jumlah jenis pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang diawasi penggunaannya	Trw 1 = 100	Seksi Standartisasi dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
									Trw 2 = 0						
									Trw 3 = 0						
									Trw 4 = 0						
									Trw 1 = 100		Sub Kegiatan 4. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000	Persentase peningkatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Trw 1 = 100	Seksi Standartisasi dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
									Trw 2 = 0						
									Trw 3 = 0						
									Trw 4 = 0						
4	Meningkatnya potensi, peningkatan nilai tambah, penguasaan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diberikan (%)	Angka	100	Trw 1 = 100	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 100.000.000	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%)	Trw 1 = 100	Kepala Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 100.000.000	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Trw 1 = 25%	Kepala Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Penggunaan Produk Dalam Ne
									Trw 2 = 0					Trw 2 = 25%	
									Trw 3 = 0					Trw 3 = 25%	
									Trw 4 = 0					Trw 4 = 25%	
									Trw 1 = 100		Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 50.000.00	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya	Trw 1 = 100	Kepala Seksi Peningkatan Saran Distribusi Perdagangan dan Penggunaan Produk Dalam Ne
									Trw 2 = 0						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Program	Anggaran	Indikator Kinerja Program	Target	Penanggung Jawab	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Penanggung Jawab
		Persentase produk lokal yang dipasarkan	Angka	100	Trw 1 = 100				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 2 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 4 = 0					Trw 4 = 0	
					Trw 4 = 0										
		Cakupan bina kelompok Pedagang/Usaha informal	Angka	100	Trw 1 = 100						Sub Kegiatan 1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IU, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis sitem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Rp. 1.720.161.000	Jumlah IKM yang difasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan izin usaha Industri	Trw 1 = 100	Kepala Bidang Perindustrian
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
					Trw 4 = 0						Sub Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IU, PIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	Rp. 6.435.612.000	Kunker ke Dinas Perindustrian Takalar/Jeneponto Pelatihan pembuatan gerabah	Trw 1 = 100	Kepala Bidang Perindustrian
					Trw 2 = 0									Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0									Trw 3 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
					Trw 4 = 0									Trw 4 = 0	
		Cakupan bina kelompok pengrajin	Angka	102	Trw 1 = 100	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 77.500.000	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor (%)	Trw 1 = 100	Seksi Standarisasi dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Rp. 77.500.000	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan	Trw 1 = 100	Seksi Standarisasi dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
					Trw 2 = 0				Trw 2 = 0					Trw 2 = 0	
					Trw 3 = 0				Trw 3 = 0					Trw 3 = 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PERMEPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan monitoring merupakan langkah teknis dalam penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam hal evaluasi, melaporkan hasil pencapaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan hasil rencana aksi merupakan dokumen evaluasi atas penjabaran dari pencapaian setiap rencana aksi Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi rencana aksi dilakukan setiap triwulan untuk melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan dapat dijadikan sebagai evaluasi serta perbaikan yang dianggap perlu dalam pencapaian kinerja, baik saat sedang berjalannya kegiatan maupun di tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan hasil evaluasi rencana aksi dinas tahun 2023 dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun tujuan disusunnya evaluasi rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi terstruktur akan pencapaian kinerja setiap triwulan. Sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan secara berkala per triwulan
3. Memberikan progres atas pencapaian kinerja program dan kegiatan per triwulan

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANAGGARAN 2023

Kode Rekening	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,503,199,900.00	4,294,587,480.00	208,612,420.00	95,37
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,811,745,900.00	3,628,942,480.00	182,803,420.00	95,20
2 08 01 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	28,318,300.00	22,897,500.00	5,420,800.00	80,86
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,086,500.00	15,701,700.00	5,384,800.00	74,46
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,608,900.00	1,572,900.00	36,000.00	97,76
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	798,000.00	798,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2,389,900.00	2,389,900.00	0.00	100
2 08 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3,077,088,000.00	2,920,671,139.00	156,416,861.00	94,92
2 08 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,042,550,000.00	2,886,498,139.00	156,051,861.00	94,87
2 08 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,376,000.00	26,011,000.00	365,000.00	98,62
2 08 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100
2 08 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	100
2 08 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,802,000.00	1,802,000.00	0.00	100
2 08 01 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75

2 08 01 2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,235,200.00	263,589,600.00	10,645,600.00	96,12
2 08 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,278,000.00	16,278,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,624,000.00	7,216,000.00	408,000.00	94,65
2 08 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,260,400.00	3,092,400.00	168,000.00	94,84
2 08 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242,197,800.00	232,128,200.00	10,069,600.00	95,84
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,736,400.00	281,753,862.00	2,982,538.00	98,95
2 08 01 2.08.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,490,000.00	69,896,262.00	2,593,738.00	96,42
2 08 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212,246,400.00	211,857,600.00	388,800.00	99,82
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	112,340,000.00	108,149,379.00	4,190,621.00	96,27
2 08 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,630,000.00	34,477,084.00	152,916.00	99,56
2 08 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,270,000.00	50,470,920.00	3,799,080.00	93,00
2 08 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,190,000.00	8,955,625.00	234,375.00	97,45
2 08 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	14,250,000.00	14,245,750.00	4,250.00	99,97
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	522,188,800.00	520,898,200.00	1,290,600.00	99,75
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18
2 08 02 2.01.02	Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03	<i>Pencegahann Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01 01	Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,000,000.00	30,513,000.00	2,487,000.00	92,46
2 08 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	38,622,000.00	11,378,000.00	72,24
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50

2 08 07 2.01	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
2 08 07 2.01 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,816,817,280.00	3,165,869,716.00	650,947,564.00	82,95
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	175,400,000.00	150,338,686.00	25,061,314.00	85,71
2 14 02 2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabuapten/Kota</i>	175,400,000.00	150,338,686.00	25,061,314.00	85,71
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34,200,000.00	34,160,000.00	40,000.00	99,88
2 14 02 2.02 13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	77,000,000.00	70,443,686.00	6,556,314.00	91,49
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelapotran Program KKBPK	64,200,000.00	45,735,000.00	18,465,000.00	71,24
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,619,917,280.00	2,028,396,030.00	591,521,250.00	77,42
2 14 03 2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	1,015,650,000.00	886,461,750.00	129,188,250.00	87,28
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	80,000,000.00	76,988,000.00	3,012,000.00	96,24
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	148,920,000.00	1,080,000.00	99,28
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	143,000,000.00	142,309,000.00	691,000.00	99,52
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	562,650,000.00	452,016,750.00	110,633,250.00	80,34
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	80,000,000.00	66,228,000.00	13,772,000.00	82,79
2 14 03 2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	593,996,280.00	593,996,280.00	0.00	100
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasiona; PKB/PLKB	20,396,280.00	20,396,280.00	0.00	100

2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	573,600,000.00	573,600,000.00	0.00	100
2 14 03 2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	582,771,000.00	392,636,000.00	190,135,000.00	67,37
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,000,000.00	34,760,000.00	10,240,000.00	77,24
2 14 03 2.03 03	Peningkata Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	487,071,000.00	308,168,000.00	178,903,000.00	63,27
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KEsehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25,500,000.00	25,278,000.00	222,000.00	99,13
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25,200,000.00	24,430,000.00	770,000.00	96,94
42 14 03 2.04	<i>Pendayagunaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB</i>	427,500,000.00	155,302,000.00	272,198,000.00	36,33
42 14 03 2.03	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9,000,000.00	8,982,000.00	18,000.00	99,80
42 14 03 2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418,500,000.00	146,320,000.00	272,180,000.00	34,96
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01	<i>Pelaksnaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</i>	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatann Ketahanan dan KEsejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360,000,000.00	352,170,000.00	7,830,000.00	97,83
2 14 04 2.01 04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengolala dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	661,500,000.00	634,965,000.00	26,535,000.00	95,99
TOTAL		8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67

BAB III

HAMBATAN DAN KENDALA

Adapun hambatan dan kendala yang tergambar berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi tahun 2023 secara umum adalah : pada program Pembinaan Keluarga Berencana sebagian besar anggaran tersebut adalah anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang harus berpedoman pada petunjuk teknis DAK 2023 serta Belum maksimalnya dukungan OPD dan stakeholder terkait dalam rangka intervensi dan konvergensi percepatan penurunan stunting. Pada sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang menyisahkan anggaran sebesar RP. 178,903,000. Hal tersebut disebabkan tidak bolehnya dobel klaim antara BPJS dengan Anggaran DP3AP2KB, dimana jika peserta KB telah dibayarkan jasa mediknya oleh BPJS maka tidak boleh dianggarkan pada anggaran lainnya. Pada Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB tersisa anggaran sebesar Rp. 272,180,000. Hal tersebut disebabkan tidak semua kampung KB yang ada dapat melaksanakan kegiatan secara optimal serta Kurang aktifnya pengurus kampung KB.

Untuk menghindari hal- hal tersebut di atas maka perlu dilakukan upaya, antara lain melakukan pembekalan Pokja Kampung KB setiap tahun, melaksanakan koordinasi yang baik dengan semua fasilitas kesehatan, Dinas kesehatan dan Rumah Sakit agar tidak ada lagi dobel klaim dalam pembayaran jasa medik serta koordinasi yang

baik dengan semua UPTD dan Penyuluh KB serta peningkatan komitmen lintas sektor dalam keterlibatan dan perhatiannya dalam percepatan penurunan stunting

BAB IV

PENUTUP

Demikian evaluasi rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja secara akuntabel.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

RENCANA AKSI TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
Meningkatnya nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai Sakip	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : B (60)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Kinerja Fisik	TW1 : 25% TW2 : 50% TW3 : 75% TW4 : 100%	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	TW1 : TW2 : 100% TW3 : TW4 :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda	TW1 : TW2 : 1 TW3 : TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TW1 : TW2 : 1 TW3 : TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW1 : 3 TW2 : TW3 : TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW1 : 1 TW2 : 1 TW3 : 1 TW4 : 1	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	TW1 : TW2 : TW3 : 100% TW4 :	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	TW1 : TW2 : TW3 : 7 TW4 :	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	TW1 : 125 TW2 : 154 TW3 : 375 TW4 : 500	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bhaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	TW1 : 14 TW2 : 14 TW3 : 14 TW4 : 14	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW1 : 15 TW2 : 15 TW3 : 15 TW4 : 15	
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
Meningkatnya Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase Nilai Temuan Keuangan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 0%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	TW1 : 20% TW2 : 40% TW3 : 60% TW4 : 83%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TW1 : 30 TW2 : 30 TW3 : 30 TW4 : 30	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	TW1 : 6 TW2 : 6 TW3 : 6 TW4 : 6	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	TW1 : 1 TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
						Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Brang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TW1 : TW2 : 2 TW3 : TW4 : 2	
									Penatausahaan Barang Milik Derah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TW1 : TW2 : 1 TW3 : TW4 : 1	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	TW1 : TW2 : 2 TW3 : TW4 :	
									Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	TW1 : TW2 : 7 TW3 : TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	TW1 : TW2 : 8 TW3 : TW4 :	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TW1 : 17 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	TW1 : 3 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW1 : 12 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	TW1 : 14 TW2 : TW3 : TW4 :	
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	TW1 : TW2 : 85% TW3 : TW4 :	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	TW1 : TW2 : 85% TW3 : TW4 :	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	TW1 : TW2 : 85% TW3 : 85% TW4 :	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Teknokratik)	TW1 : 2 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	TW1 : 2 TW2 : TW3 : TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	TW1 : TW2 : 1 TW3 : TW4 :	
									Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	TW1 : 26 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	TW1 : 11 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang di Tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	TW1 : TW2 : 1 TW3 : 1 TW4 :	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	TW1 : 100% TW2 : TW3 : TW4 :	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	TW1 : 68 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	TW1 : 38 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	TW1 : 100% TW2 : TW3 : TW4 :	Koordinasi Pengendalian	Jumlah laporan Hasil Pengendalian	TW1 : 1	
									Perencanaan dan Pelaksanaan	Perencanaan dan Pelaksanaan	TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Pembangunan		
									Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	TW1 : 1 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	TW1 : 1 TW2 : 1 TW3 : 1 TW4 : 1	
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas	TW1 : TW2 : 85% TW3 : TW4 :	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran	TW1 : TW2 : 85% TW3 : TW4 :	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	TW1 : TW2 : 85% TW3 : 85% TW4 :	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	TW1 : 11 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW1 : TW2 : 11 TW3 : TW4 :	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	TW1 : 5 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW1 : TW2 : 5 TW3 : TW4 :	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	TW1 : TW2 : 85% TW3 : 85% TW4 :	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	TW1 : 3 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW1 : TW2 : 3 TW3 : TW4 :	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	TW1 : 3 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW1 : TW2 : 3 TW3 : TW4 :	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	TW1 : TW2 : 85% TW3 : 85% TW4 :	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	TW1 : 3 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW1 : TW2 : 3 TW3 : TW4 :	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	TW1 : 11 TW2 : TW3 : TW4 :	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	TW1 : TW2 : 11 TW3 : TW4 :	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	TW1 : TW2 : TW3 : 1 TW4 :	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Penerapan Inovasi Daerah	100%	Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	100%	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang	100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Aspek Aspek Sosial	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	50%	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil penelitian, pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	
									Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 : 1	

Benteng, 10 Januari 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA
KAB. KEP. SELAYAR



Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640310 198611 1 002

RENCANA AKSI TAHUN 2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				AKSI/KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN				TARGET OUTPUT/KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100%				1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	100%				1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100%		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD			100%		1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
4	Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%				Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	100%				1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
5	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100%	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD				100%	1 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan

6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100%				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%					2 Laporan	Kasubag program dan Keuangan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25%	50%	75%	100%	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25%	50%	75%	100%		13 Laporan	Kasubag program dan Keuangan
8	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25%	50%	75%	100%	Penyediaan gaji dan tunjangan AsN	25%	50%	75%	100%		26 Orang	Kasubag program dan Keuangan
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	100%					1 Laporan	Kasubag program dan Keuangan
10	Tersedianya dokumen akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25%	50%	75%	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25%	50%	75%	100%		6 Dokumen	Kasubag program dan Keuangan
11	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25%	50%	75%	100%	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25%	50%	75%	100%		1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum

12	Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25%	50%	75%	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	25%	50%	75%	100%	1 Orang	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
13	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25%	50%	75%	100%	1 Paket	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
14	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25%	50%	75%	100%	1 Paket	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
15	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	25%	50%	75%	100%	1 Paket	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
16	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25%	50%	75%	100%	89 Dokumen	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
17	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi (laporan hasil perjalanan dinas)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25%	50%	75%	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25%	50%	75%	100%	215 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
18	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25%	50%	75%	100%	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25%	50%	75%	100%	1 Dokumen	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum

20	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
21	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
22	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25%	50%	75%	100%	19 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
23	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25%	50%	75%	100%	32 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
24	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25%	50%	75%	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25%	50%	75%	100%	1 Unit	Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
25	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	25%	50%	75%	100%	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik	25%	50%	75%	100%	3 Layanan	Kabid Perpustakaan

26	Terlaksananya Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25%	50%	75%	100%	Pengelolaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	25%	50%	75%	100%	200 Eksemplar	Kabid Perpustakaan
27	Tersedianya Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	40 Dokumen	Kabid Perpustakaan
28	Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25%	50%	75%	100%	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	25%	50%	75%	100%	1 Perpustakaan	Kabid Perpustakaan
29	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25%	50%	75%	100%	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25%	50%	75%	100%	250 Arsip	Kabid Kearsipan
30	Tersedianya Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25%	50%	75%	100%	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25%	50%	75%	100%	1 Pengguna	Kabid Kearsipan

31	Tesedianya Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	25%	50%	75%	100%	1 Laporan	Kabid Kearsipan
32	Tersedianya Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25%	50%	75%	100%	Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25%	50%	75%	100%	200 Arsip	Kabid Kearsipan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

H. SALAHUDDIN, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670604 199003 1 015

